

DINAMIKA GERAKAN MASYARAKAT SEKITAR UMBUL WADON: Studi Gerakan Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Sumber Daya Air 1998-2004

Astri Hanjarwati

Abstract

The phenomenon in Umbul Wadon happened when the inhabitant joined an action organization to hold an action collectively. The purpose was to change government policy people related to taking the benefit of Umbul Wadon's spring for their purpose.

According to Neil J Smelser's theory, Umbul Wadon people movement emerged because of a strain in society. It happened in 1998. There was an exploitation in Umbul Wadon's spring done by PDAM Sleman. This exploitation was done without communication with the inhabitant. In 2004, the social action happened once again because of fraud done by PDAM Sleman and PD Argajasa that took water more than the quota which has been agreed in AMDAL. Collective behavior of Umbul Wadon inhabitant emerged. It was because of gotong royong (cooperating to do something) and togetherness spirit which are still viscous to the structure of Javanese society.

Umbul Wadon's social action is encouraged by the desire to get equal right of water resource. With the same necessity and purpose, the inhabitant united in a group to do an action collectively. In 1998, the action was done by holding a demonstration in DPRD Sleman. In 2004, the action was done through media campaign. The mass mobilization was not done by a certain group, but the mass united their selves into a group

and than they did an action collectively to achieve their purpose.

Keywords: *Social action, Equal right of water resource, Government policy*

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan sumber daya yang tidak tergantikan. Dewasa ini kebutuhan akan air semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Disaat masyarakat banyak yang membutuhkan air, jumlah air yang tersedia semakin berkurang. Berkurangnya ketersediaan air dikarenakan rusaknya ekosistem alam akibat dari pembangunan yang diterapkan pada masa Orde Baru yaitu pembangunan yang tidak terkendali dan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi secara cepat. Momentum pembangunan dicapai dengan pengorbanan (*at the expense*), deteriorasi (memburuk atau rusak) ekologis, penyusutan sumber alam, timbulnya kesenjangan sosial, dan dependensi.¹ Asumsi yang ada adalah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya baru kemudian dilakukan pemerataan hasil-hasil pembangunan secara merata. Namun kenyataannya tidak terjadi pemerataan tetapi justru menciptakan kesenjangan. Kebijakan – kebijakan pembangunan diterapkan dengan system *top down* sehingga mengesampingkan partisipasi masyarakat.

Propinsi DI.Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman tidak luput dari dampak negatife kebijakan pembangunan. Kerusakan ekosistem yang terjadi di Kabupaten Sleman khususnya di lereng Merapi mengakibatkan matinya sumber air bagi masyarakat. Keringnya mata air disebabkan karena berkurangnya luas daerah resapan air yang beralih fungsi menjadi permukiman penduduk dan industri pariwisata. Pengurangan daerah resapan air di Kecamatan Ngemplak, Turi, Pakem, Ngaglik dan Cangkringan dapat dilihat pada data dari BPS DI.Yogyakarta berikut:

Tabel.1. Data alih fungsi lahan

Tahun	Daerah resapan air	Daerah permukiman
2000	10.472 hektar	7.760 hektar
2004	10.360 hektar	7.781 hektar

Sumber: BPS DIY tahun 2010

Pada saat ini yang tersisa hanya dua mata air yaitu mata air Bebung dan mata air Umbul Wadon, dimana debit air paling besar adalah mata air

¹ Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

Umbul Wadon yaitu sebesar 355-400 liter per detik pada musim kemarau dan 600 liter per detik pada musim hujan.² Mata air ini menjadi tumpuan masyarakat untuk kelangsungan hidupnya yaitu memenuhi kebutuhan rumah tangga, beternak sapi perah dan irigasi pertanian. Padahal menurut catatan Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 1979, di Kabupaten Sleman terdapat 102 mata air, rata-rata ada dua atau tiga mata air di setiap desa.³

Mata air Umbul Wadon terletak di Dusun Pangukrejo, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan. Air dari Umbul Wadon ini memenuhi kebutuhan air belasan desa di Cangkringan, Ngemplak, Pakem, Ngaglik dan Turi yang mengalir melalui sungai. Pada tahun 1992 mata air dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari selain untuk irigasi dengan mengandalkan tenaga gravitasi. Jaringan ini dibuat atas swadaya dari masyarakat. Keberhasilan masyarakat merangsang proyek serupa, yaitu proyek propinsi P2KT (Proyek Pengelolaan Air Tanah) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat desa Umbul harjo. Harapan masyarakat air dapat dialirkan dengan debit air 4 liter/detik namun pada kenyataannya hanya 2,5liter/detik sehingga proyek ini gagal dan tidak digunakan oleh masyarakat.

Pada tahun 1997 PDAM Sleman mulai membangun proyek yaitu dengan memasang pipa-pipa saluran air. Proyek ini tidak dikomunikasikan kepada masyarakat dan baru diketahui oleh masyarakat bahwa proyek ini milik PDAM Sleman setelah pembangunan hampir selesai. Selain PDAM Sleman Umbul Wadon juga dimanfaatkan oleh PDAM Tirta Marta, dan PD. Anindya. Kondisi ini membuat masyarakat khawatir akan adanya privatisasi air yang berakibat pada berkurangnya suplai air untuk kebutuhan masyarakat. Pada saat itu, ribuan masyarakat di tiga kecamatan, yaitu Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak, menolak dan berdemo di kantor Bupati Sleman sebagai reaksi atas kebijakan pemerintah Kabupaten Sleman yang tidak pro rakyat. Massa bahkan sudah sempat melakukan pembongkaran pipa-pipa berdiameter $\frac{3}{4}$ meter tersebut. Aksi ini selain dilakukan oleh masyarakat juga didukung oleh organisasi masyarakat bernama Komunitas Lereng Merapi. Sampai akhirnya konflik tersebut bisa diredam melalui negosiasi yang diakomodir dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Amdal tersebut mengatur mengenai pembagian air, yaitu 50 persen untuk irigasi pertanian, 35 persen untuk air minum (dibagi untuk PDAM Sleman, PDAM Tirta Marta, dan PD. Anindya), serta 15 persen

² http://www.forplid.net/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=1, download 13 juli 2008. 05.57

³ http://digilib.ampl.or.id/detail/detail.php?row=4&tp=artikel&ktg=airminum&kd_link=&kode=62, diunduh pada, 13 juli 2008. 06.03

untuk konservasi. Amdal ini diberlakukan mulai tahun 2000.

Pengelolaan lingkungan dan sumberdaya menjadi suatu proses pengelolaan konflik, hal ini dikarenakan masyarakat selalu terdiri dari individu dan kelompok yang mempunyai nilai-nilai, kepentingan, keinginan, harapan, dan prioritas yang berbeda sehingga selalu ada ketegangan dari karakter yang berbeda atau bahkan terdapat ketidakcocokan diantara karakter-karakter tersebut.⁴ Demikian yang terjadi di Umbul Wadon dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan rakyat maka muncullah konflik dalam pengelolaan sumber daya air.

Sejak saat itu sampai dengan pertengahan tahun 2003, intensitas konflik menurun, walaupun bersifat laten. Meski demikian, dalam interval waktu tersebut sebagian masyarakat sudah menengarai adanya kecurangan air, yang terbukti dari aliran air irigasi yang semakin mengecil. Akan tetapi, masyarakat belum mempunyai kapasitas untuk menyelesaikannya atau berkonsolidasi untuk bertindak. Melalui rangkaian diskusi terbatas para aktivis dan masyarakat, kecurangan tersebut dimunculkan melalui media massa pada Oktober 2003. Sejak saat itu isu mengenai konflik Umbul Wadon mulai meningkat lagi. Selain dipicu oleh publikasi, konflik meningkat karena aliran air irigasi masyarakat yang sebelumnya juga disuplai dari Umbul Lanang, mulai September 2003 terhenti, karena Umbul Lanang mulai tidak mengeluarkan air. Praktis irigasi hanya bergantung dari Umbul Wadon yang sudah dieksploitasi untuk berbagai macam keperluan.

Konflik kembali mencuat karena PDAM Sleman tidak mematuhi aturan pembagian air sesuai kesepakatan bersama yang tertera dalam Amdal. Seperti disebut di atas, jatah 35 persen untuk air minum dibagi untuk tiga perusahaan, yaitu PDAM Sleman, PDAM Kodya Yogyakarta, dan PD. Anindya. Namun kenyataannya, dari hasil pengukuran yang dilakukan pada Oktober, Desember 2003 dan April 2004, PDAM Sleman telah mengambil jatah air yang berlebihan, dari yang diijinkan sekitar 80 liter/detik menjadi sekitar 190 liter/detik atau hampir 150 persen lebih banyak dari yang diijinkan.⁵

Dari permasalahan itulah kemudian muncul ketidakpuasan masyarakat. Perilaku PDAM Sleman yang mengambil air secara berlebihan tersebut telah menyebabkan ratusan hektar lahan pertanian yang terletak di Kecamatan Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak, mengalami gagal panen dan sulit

⁴ Mitchell, Bruce, B. Setiawan, Dwita Hadi Rahmi, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003). hlm. 19-20.

⁵ *Ibid.*,

untuk ditanami lagi. Kecurangan PDAM secara terbuka disampaikan melalui advokasi di media massa dan pertemuan masyarakat pada April 2004. Advokasi lebih merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (*incremental*).⁶

Tahun 2004 masyarakat melakukan protes kembali akan adanya kecurangan yang dilakukan PDAM Sleman dan PD Anindya yaitu kedua perusahaan air minum tersebut memasang pipa by pass yaitu pipa yang dipasang tidak pada alat pengukur. Selain itu protes masyarakat juga dipicu oleh peresmian perusahaan air minum Evita oleh Gubernur DIY, dan diam-diam PDAM Sleman juga menjual air kepada EVITA. Ironis pada saat masyarakat kekurangan air untuk kebutuhan air minum dan pertanian pemerintah justru menjual air kepada pihak swasta demi kepentingan komersial. Protes ini berbuah adanya tinjauan ulang AMDAL tahun 2000, dan disepakati AMDAL jilid dua tahun 2004.

Kebijakan negara yang tidak memperhatikan kondisi masyarakat setempat dan cenderung memihak suatu kelompok masyarakat seringkali mendapat tanggapan dari masyarakat melalui cara-cara yang berlaku dan dianggap dapat menyelesaikan masalah masyarakat tersebut. Hal ini dikatakan oleh Suyanto (1990) sebagai berikut:⁷

Pengalaman di berbagai negara sudah membuktikan, bahwa tekanan yang berlebihan terhadap dinamika masyarakat justru menimbulkan keguncangan terhadap keamanan negara dan berkurangnya legitimasi negara di mata rakyat. Negara yang dinilai rakyat terlalu memperjuangkan kepentingan-kepentingannya sendiri dengan berbagai bentuk tindakan kekerasan justru merupakan bomerang. Berbagai aksi yang dilakukan oleh masyarakat umumnya sangat beragam dalam melakukan perlawanan misalnya dengan cara mengadu ke DPR, mengirim surat ke Komisi Nasional HAM, mogok makan, melakukan aksi unjuk rasa, menggelar parlemen jalanan hingga bentuk aksi kekerasan dan perusakan.

Konflik Umbul Wadon juga memperlihatkan bahwa rakyat telah melakukan perlawanan atas ketidakadilan dari kebijakan pemerintah. Menurut Charles O. Jones bahwa masalah yang menyangkut pada kebijakan publik ada dua tipe yaitu, *pertama* masalah-masalah tersebut dikarakteristikan oleh adanya perhatian kelompok dan warga yang terorganisasi untuk melakukan tindakan (*action*), *kedua* masalah-masalah

⁶ Mansour Fakhri, Roem Topatimasang, Toto Rahardjo, *Mengubah Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Insist Press, 2007), hlm. viii.

⁷ Fitria Agustina, N. Kusuma, *Gelombang Perlawanan Rakyat (Kasus-kasus Gerakan Sosial di Indonesia)*, (Yogyakarta: Insist Press, 2004), hlm. 165.

tersebut dapat dipecahkan secara individual/ pribadi (dengan demikian ia menjadi masalah publik), tetapi kurang terorganisasi dan kurang mendapatkan dukungan.⁸ Masalah Umbul Wadon termasuk dalam kategori pertama karena masyarakat secara terorganisir melakukan aksi kolektif untuk mengubah kebijakan publik sehingga menjadi pro rakyat.

Fenomena diatas menarik perhatian penulis untuk melakukan kajian yang lebih mendalam. Fokus kajian yang dipilih oleh penulis adalah mengenai dinamika gerakan masyarakat sekitar Umbul Wadon dalam memperjuangkan hak atas sumber daya air. Kurun waktu 1997-2004 terjadi sebuah dinamika gerakan masyarakat dalam mencapai hak – hak rakyat atas sumber daya air Umbul Wadon, yaitu pada tahun 1998 masyarakat melakukan aksi besar-besaran dengan mendatangi kantor Bupati Sleman dan akhirnya disepakati AMDAL. Pada periode ini masyarakat melakukan gerakan bersama dengan Komunitas Masyarakat Lereng Merapi (KRLM) dimana anggotanya sebagian adalah penduduk asli desa Umbulharjo. Tahun 2000 AMDAL dilanggar oleh PDAM Sleman dan PD.Anindya, kemudian masyarakat kembali melakukan protes. Berbeda dengan protes pada tahun 1998, protes yang kedua ini dilakukan melalui media massa. Aktor dari gerakan periode ini adalah masyarakat yang dibantu oleh LSM Wana Mandhira dalam advokasinya.

B. Rumusan Masalah

Fenomena konflik air Umbul Wadon yang memicu masyarakat melakukan gerakan sosial dalam hal ini aksi kolektif memperjuangkan hak atas air yang telah penulis sampaikan di bagian latar belakang, mengantarkan penulis pada pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana dinamika gerakan masyarakat sekitar Umbul Wadon dalam memperjuangkan hak atas sumber daya air dalam rentang waktu tahun 1998-2000 sehingga disusun AMDAL jilid I dan rentang waktu 2000-2004 sehingga disusun AMDAL jilid II? Secara lebih khusus studi ini tertarik untuk melihat:

1. Bagaimana proses masyarakat sekitar Umbul Wadon menggabungkan diri dalam melakukan aksi kolektif ?
2. Bagaimana proses masyarakat dalam melakukan komunikasi dan advokasi dengan pemerintah untuk mengubah kebijakan pemerintah mengenai pembagian air Umbul Wadon secara adil demi kepentingan rakyat?

C. Tujuan Penelitian

⁸ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, 2002), hlm. 14.

Mengetahui dinamika gerakan masyarakat sekitar Umbul Wadon dalam memperjuangkan hak atas sumber daya air dalam rentang waktu 1998-2004 sehingga disusun AMDAL jilid I dan II, (proses penggabungan diri, proses komunikasi, negosiasi, ancaman yang diperoleh, hambatan dan tantangan dalam melakukan aksi kolektif, dan proses komunikasi dan advokasi atas kebijakan pemerintah sehingga berhasil dalam penyusunan AMDAL).

D. Kerangka Teori

1. Gerakan Sosial

Giddens (1993)¹ menyatakan bahwa gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga yang mapan. Pengertian yang nyaris persis diutarakan oleh Tarrow (1998)² yang menempatkan gerakan sosial sebagai politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dalam kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya. Ketika perlawanan ini didukung oleh jaringan sosial yang kuat dan digaungkan oleh resonansi kultural dan simbol-simbol aksi, maka politik perlawanan mengarah ke interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak lawan dan hasilnya adalah gerakan sosial.

Memahami dinamika suatu gerakan kemasyarakatan, lama maupun baru tidak akan lengkap kalau tidak berusaha memahami medan kekuatan (*force field*) di mana gerakan kemasyarakatan itu beroperasi. Kedua kekuatan besar yang perlu diteliti interaksinya dengan gerakan-gerakan kemasyarakatannya (*social movements*) adalah Negara, dengan segala komponennya dan modal dengan segala komponennya.³

2. Konsep Dinamika

Dinamika adalah gerak atau kekuatan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok dalam hubungan yang dapat menimbulkan

¹ Suharko, *Gerakan Sosial*, (Malang: Averroes Press, 2006), hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 1-2.

³ Victor Silaen, *Gerakan Sosial Baru (Perlawanan Komunitas Lokal pada Kasus Indorayon di Toba Samosir)*, (Yogyakarta: IRE Press, 2006), hlm. xxxvi.

perubahan di dalam tatanan hubungan yang bersangkutan.⁴ Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, dinamika dapat pula diartikan sebagai gambaran tentang pergerakan sosial yang terarah pada pergeseran pola-pola sosial formal dan informal. Hal ini bisa menggejala pada perubahan/ pergeseran bentuk (struktur) dan aktivitas sosial yang bermotif reaksi pertahanan diri dan perlawanan atas desakan-desakan ekstern.

3. Teori Yang Digunakan dalam Penelitian

Penulis dalam melakukan studi mengenai Dinamika gerakan masyarakat sekitar Umbul Wadon menggunakan dua teori, yang pertama *Theory of collective behaviour* dari Neil J Smelser yaitu terkait dengan kondisi yang memungkinkan munculnya perilaku kolektif, diantaranya: *Structural conduciveness*: beberapa struktur sosial yang memungkinkan munculnya perilaku kolektif, *Structural Strain*: yaitu munculnya ketegangan dalam masyarakat yang muncul secara terstruktur, *Generalized belief* : share interpretation of event, *Precipitating factors*: ada kejadian pemicu (*triggering incidence*), *Mobilization for actions*: adanya mobilisasi massa. *operation of Social Control* – akibat agen yang ditugaskan melakukan kontrol sosial tidak berjalan dengan baik akan sangat cocok untuk menjelaskan fenomena gerakan sosial masyarakat sekitar Umbul Wadon. Yang kedua adalah *the main determinants of collective action* dari Charles Tilly yang mengintrodusir lima komponen mobilisasi yaitu kepentingan, organisasi, mobilisasi, peluang, dan tindakan kolektif itu sendiri.

Teori Neil J Smelser mengidentifikasi beberapa kondisi yang memungkinkan munculnya perilaku kolektif, diantaranya: *Structural conduciveness* yaitu beberapa struktur sosial yang memungkinkan munculnya perilaku kolektif, *Structural Strain* yaitu munculnya ketegangan dalam masyarakat yang muncul secara terstruktur. Misalnya: antar pendukung kontestan pilkada. *Generalized beliefs*: share interpretation of event, *Precipitating factors*: ada kejadian pemicu (*triggering incidence*). *Mobilization for actions*: adanya mobilisasi massa. *Failure of Social Control* – akibat agen yang ditugaskan melakukan kontrol sosial tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan pada Teori Neil J Smelser bahwa fenomena gerakan

⁴ Kamus Ilmiah

masyarakat Umbul Wadon timbul karena ada ketegangan dalam masyarakat yaitu pada tahun 1998 adanya eksploitasi mata air Umbul Wadon oleh PDAM Sleman yang tidak dikomunikasikan dengan masyarakat. Sedangkan tahun 2003, pemicu adanya gerakan sosial adalah adanya kecurangan dari PDAM Sleman dan PD Argajasa yang mengambil jatah air secara berlebihan, tidak sesuai dengan porsi yang telah disepakati dalam AMDAL.

Munculnya perilaku kolektif pada masyarakat sekitar Umbul Wadon juga didukung oleh struktur masyarakat Jawa yang masih kental dengan gotongroyong dan kebersamaan. Dalam kasus Umbul Wadon masyarakat didorong oleh keinginan untuk memperoleh hak yang sama atas sumber daya air. Dengan persamaan kepentingan dan tujuan, maka masyarakat secara alamiah menggabungkan diri dalam sebuah kelompok untuk melakukan aksi kolektif. Pada tahun 1998 aksi kolektif dilakukan dengan cara berdemonstrasi ke Gedung DPRD Sleman sedangkan pada tahun 2004 aksi melalui kampanye media.

Mobilisasi massa dilakukan oleh kelompok tertentu, yaitu Komunitas Rakyat Lereng Merapi yang sebagian anggotanya adalah dari masyarakat Umbulharjo. Masyarakat dikumpulkan dalam sebuah musyawarah untuk mencari solusi atas permasalahan mereka. Salah satu cara yang ditempuh oleh masyarakat adalah melakukan gerakan sosial yaitu diawali dengan berdemonstrasi secara damai, baru kemudian melakukan advokasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang konkrit dan memihak pada kepentingan rakyat.

Gerakan masyarakat Umbul Wadon juga terjadi karena pemerintah sebagai agen yang melayani masyarakat tidak dapat berfungsi dengan baik. Gerakan masyarakat tahun 1998 diakibatkan oleh kebijakan pemerintah yang mengeksploitasi mata air Umbul Wadon tanpa memperhitungkan kepentingan rakyat. Sedangkan pada tahun 2003, yang seharusnya pemerintah mengontrol implementasi kebijakan AMDAL namun pada kenyataannya tidak demikian yaitu terjadi kecurangan dari PDAM Sleman sehingga merugikan masyarakat.

Charles Tilly⁵ yang mengembangkan model mobilisasi dalam tindakan kolektif mengatakan bahwa, *the main determinants* dari mobilisasi kelompok itu meliputi : organisasi, interes, peluang atau

⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

ancaman, dan kemampuan kelompok dalam menyikapi represi atau fasilitas.

Dalam kasus Umbul Wadon analisis berdasarkan Teori Tilly yaitu masyarakat melakukan aksi kolektif karena adanya kepentingan bersama yaitu untuk memperoleh hak atas sumber daya air Umbul Wadon. Dalam melakukan aksinya masyarakat membentuk organisasi KRLM (Komite Rakyat Lereng Merapi) pada tahun 1998 dan tahun 2004 masyarakat menunjuk perwakilan dari mereka untuk bergabung dalam tim tujuh dalam menyelesaikan masalah Umbul Wadon. Dalam melakukan aksi tersebut masyarakat mempunyai peluang dan mendapatkan ancaman, baik secara internal maupun secara eksternal.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus yang diimplementasikan melalui teknik sebagai berikut:

1. Pengambilan informan dilakukan secara purposif yaitu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam dalam penelitian dan pada umumnya informan berjumlah kecil tetapi sebanyak mungkin menjangkau informasi untuk tujuan penelitian dan tetap dalam batasan masalah penelitian, maka jumlah informan yang diambil tidak ditentukan batasnya.
2. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap actor gerakan masyarakat, masyarakat Umbulharjo, Pemerintah Umbulharjo, PDAM Sleman, PD.Anindya dan LSM Wanamandhira.
3. Analisa data dilakukan dengan penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

F. Pembahasan

a. Proses Terjadinya Aksi Kolektif tahun 1998-2000

1. Motif Masyarakat Melakukan Aksi Kolektif

Air bagi masyarakat desa sangat vital karena bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tetapi juga untuk keperluan mata pencaharian seperti untuk peternakan sapi perah, pengairan ladang dan sawah. Kehidupan masyarakat di lereng Gunung Merapi sangat bergantung pada mata air Umbul Wadon karena di wilayah itu sangat sulit membuat sumur. Selain itu juga dipicu karena matinya sumber-sumber mata air lainnya yang pada zaman dahulu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pada bulan April 1998 sebagian masyarakat di lereng Gunung Merapi yaitu wilayah Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Pakem, Kecamatan Turi, Kecamatan Ngemplak, dan Kecamatan Ngaglik merasakan kekurangan air walau kadang hujan masih turun. Hal tersebut masih menjadi perbincangan sebagian kecil masyarakat lereng Merapi yang merasakan kekurangan air maka dicarilah penyebabnya. Setelah dilakukan penyelidikan oleh sebagian masyarakat ternyata air Umbul Wadon sudah dialirkan lewat pipa-pipa besar berdiameter 16" (40cm). Masyarakat jengkel, marah, menderita, tetapi tidak tahu harus berbuat bagaimana. Beberapa orang berkumpul membicarakan langkah-langkah yang mesti dilakukan.

2. Membentuk Organisasi

Setelah mencari tahu dan melakukan berbagai kajian tentang proyek PDAM tersebut sekaligus melakukan penggalangan massa, masyarakat kemudian membentuk organisasi yang diberi nama Komite Rakyat Lereng Merapi (KRLM) yang terdiri dari perwakilan-perwakilan masyarakat Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Pakem, Kecamatan Ngemplak, dan Kecamatan Ngaglik.

Organisasi yang dibentuk dalam rangkaian gerakan masyarakat berfungsi untuk mempermudah koordinasi dan konsolidasi masyarakat. Organisasi ini dibentuk oleh masyarakat atas dasar latarbelakang yang sama dan untuk mencapai tujuan yang sama. Latar belakang yang sama adalah sama-sama merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah atas akses sumber daya air Umbul Wadon dan mereka juga merasa terancam kehidupannya dalam hal pemenuhan kebutuhan air yang tidak dapat di substitusi oleh barang lainnya. Tujuan mereka adalah adanya pembagian yang adil antara masyarakat, pemerintah dalam hal penggunaan mata air Umbul Wadon.

Masyarakat melakukan koordinasi untuk segera melakukan aksi bersama ke Gedung DPRD Sleman, agar aspirasi mereka segera di dengar. Semua berjalan alamiah tanpa ada paksaan dan masyarakat yang bergabung semakin hari semakin bertambah. Tidak ada sosialisasi secara resmi dari organisasi namun masyarakat yang bergabung atas dasar naluri dan kepentingan yang sama. Berita mengenai akan diadakannya aksi kolektif tersebar dilingkungan masyarakat melalui komunikasi masyarakat yang terjadi secara alamiah (dari mulut ke mulut).

3. Aksi Kolektif di Depan Gedung DPRD Sleman

Pada hari senin tanggal 10 Agustus 1998, Komite Rakyat Lereng Merapi (KRLM) didukung oleh berbagai organisasi/lembaga (WALHI,

LBH, BASKARA, KARPI, KPRP, dsb) mengadakan aksi bersama di depan gedung DPRD II Sleman dan ditemui oleh Ketua dan Anggota DPRD II Sleman, Bupati Sleman dan beberapa struktural Kabupaten Sleman.

Aksi berlangsung dengan damai dengan beberapa acara diantaranya; acara spiritual dengan membawa air Umbul Wadon dengan kendil, *Happening Art*, pembacaan tuntutan rakyat.

b. Gerakan Masyarakat Tahun 2003-2004

1. Latar Belakang Gerakan Masyarakat

Setelah AMDAL selesai dibuat dan diimplementasikan pada tahun 2000, maka konflik mulai mereda. Meski demikian, dalam interval waktu tersebut sebagian masyarakat sudah menengarai adanya kecurangan air, yang dibuktikan dari aliran untuk irigasi yang semakin mengecil. Akan tetapi, masyarakat belum mempunyai kapasitas untuk menyelesaikannya atau berkonsolidasi untuk bertindak. Melalui rangkaian diskusi terbatas para aktivis (LSM Wana Mandhira) dan masyarakat, kecurangan tersebut dimunculkan melalui media massa pada September 2003. Sejak saat itu, isu mengenai konflik Umbul Wadon mulai meningkat lagi.

Konflik Umbul Wadon kembali muncul karena aliran air irigasi masyarakat yang sebelumnya juga disuplai dari Umbul Lanang, mulai September 2003 terhenti, karena Umbul Lanang mulai tidak mengeluarkan air. Praktis irigasi hanya bergantung dari Umbul Wadon yang sudah dieksploitasi untuk berbagai macam keperluan. Selain itu konflik mencuat karena PDAM Sleman tidak mematuhi aturan pembagian air sesuai kesepakatan bersama yang tertera dalam AMDAL. Seperti disebut di atas, jatah 35 persen untuk air minum dibagi untuk tiga perusahaan, yaitu PDAM Sleman, PDAM Kodya Yogyakarta, dan PD. Anindya, yaitu perusahaan daerah milik Provinsi DIY yang bergerak dalam bidang pariwisata di Kaliurang, yang salah satunya menyediakan layanan air bersih. Namun kenyataannya, dari hasil pengukuran yang dilakukan pada Oktober, Desember 2003 dan April 2004, PDAM Sleman telah mengambil jatah air yang berlebihan, dari yang diijinkan sekitar 80 liter/detik menjadi sekitar 190 liter/detik atau hampir 150 persen lebih banyak dari yang diijinkan.

2. Bentuk Gerakan Masyarakat

Langkah awal sebelum kecurangan PDAM Sleman dimunculkan ke publik adalah dengan melakukan pendidikan kritis bagi para petani, yaitu membekali petani dengan pengetahuan tentang dasar-dasar hukum pengelolaan air, AMDAL, dan hak-hak petani. Dari proses yang dilakukan

ini diharapkan akan terbangun militansi di kantong-kantong petani untuk ikut aktif berjuang mempertahankan hak-haknya. Proses ini berjalan secara kontinyu dari Agustus 2003 – Februari 2004. Pendidikan kritis ini dilakukan oleh LSM Wana Mandhira sebagai LSM yang mendampingi gerakan masyarakat pada tahun 2003.

Model gerakan sosial melalui media ini merupakan strategi adaptif masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak atas sumber daya air. Strategi adaptif masyarakat disini mempunyai makna bahwa masyarakat dalam melakukan aksi menggunakan model-model yang sesuai dengan waktu dan kondisi pada saat dilaksanakannya gerakan masyarakat agar tuntutan dikabulkan.

3. Membentuk Tim Tujuh (Tim 7) sebagai tim Negosiasi

Membentuk tim negosiasi yang terdiri atas tujuh orang yang mewakili yaitu petani, pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), dan aktivis LSM. Tim negosiasi, yang kemudian disebut Tim tujuh, bertugas untuk mewakili petani dalam mempersiapkan dan melakukan perundingan dengan pihak-pihak yang terkait, maupun menjadi juru bicara untuk kepentingan petani. Tim tujuh juga mengambil peran untuk bisa melokalisir permasalahan sehingga tetap pada fokus semula, yaitu tentang kecurangan PDAM Sleman.

Melalui proses negosiasi yang dilakukan oleh Tim tujuh dengan Pemda Sleman dan PDAM Sleman sepanjang April – Mei 2004 akhirnya membuahkan hasil, walaupun sempat dilakukan perundingan yang sangat alot beberapa kali. Pada tanggal 21-30 Mei 2004, dilakukan pengukuran debit dan pengalokasian air sesuai dengan Amdal, yang diikuti oleh Pemda Sleman, petani, LSM, dan Perusahaan Air Minum.

c. Negosiasi dan Advokasi pada tahun 1998

DPRD dan Bupati Kabupaten Sleman mengajak bernegosiasi dan dialog dengan perwakilan Komite Rakyat Lereng Merapi (KRLM) pada hari Senin tanggal 13 Agustus 1998. Dialog dan Negosiasi berlangsung di Aula Bappeda Sleman yang dihadiri berbagai unsur yaitu Perwakilan Komite Rakyat Lereng Merapi, DPRD Sleman, Bupati Sleman, LSM WALHI, Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, PDAM Sleman, PD.Anindya dan PDAM Tirta Marta.

Tim Negosiasi dari Komite Rakyat Lereng Merapi (KRLM) mengajukan tuntutan yakni :

1. Pembatalan Proyek Pengembangan Sistem Pelayanan Air Bersih (P2SPAB) PDAM Tirta Dharma (PDAM Sleman) dengan

menerbitkan SK Pembatalan dan pembongkaran atau pemutusan pipa sepanjang 2 km dari Umbul Wadon sebagai prasyarat.

2. Reformasi total pengelolaan Umbul Wadon meliputi pembuatan AMDAL. Distribusi Air Umbul Wadon juga harus diatur yaitu : 20 % untuk konservasi/reservasi, 50% untuk DAM Pluyon/ irigasi, 10% untuk konsumsi masyarakat lereng Merapi, 5% untuk PD Anindya/Argajasa, dan 15% PDAM Tirta Dharma / PDAM Sleman dan PDAM Tirta Marta. Secara Teknik pengaturan air tersebut harus melewati Bak. Maka harus dibangun Bak Reformasi dengan dilengkapi Water meter. Selain itu juga harus dilakukan reformasi terhadap manajemen dan Kinerja.
3. Reboisasi di Lereng Merapi. Perwakilan dari Komite Rakyat Lereng Merapi adalah Sigit Hidayat Nuri, Y Bambang Sugeng, Mulyono, Syahlan Hasbi, S.Eddy Harryanto. Mereka menyuarakan tuntutan rakyat. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa dalam tempo tiga puluh hari setelah pertemuan di aula Bappeda maka tuntutan Komite Rakyat Lereng Merapi akan dipenuhi oleh Bupati dan DPRD Sleman.

d. Tahap-Tahap Advokasi dan Implementasi Kebijakan tahun 1998-2000

1. Pada hari kamis, 20 Agustus 1998 dilakukan pembongkaran pipa tahap awal dengan dimeriahkan pertunjukan tarian tradisional jathilan di Dusun Pangukrejo, Desa Umbulharjo. Pembongkaran pipa merupakan pelaksanaan awal dari tuntutan rakyat atas kebijakan penggunaan air Umbul Wadon yang tidak memihak kepada rakyat. Hari ini merupakan hari yang sangat menggembirakan rakyat sehingga pembongkaran ini dimeriahkan dengan kesenian jathilan. Pembongkaran pipa ini sebagai dasar untuk dilakukan kesepakatan baru mengenai penggunaan air Umbul Wadon. Pembongkaran pipa ini bukan berarti PDAM Sleman lantas tidak memanfaatkan air Umbul Wadon, melainkan pelaksanaan proyek pemanfaatan air Umbul Wadon setelah disepakati bersama dengan semua pihak.
2. Pada tanggal 3 September 1998 KRLM membongkar bak pelepasan tekanan air dan reservoir air karena SK pembatalan proyek dan pembongkaran pipa tidak dilanjutkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Kejadian ini seharusnya tidak terjadi apabila pemerintah komitmen dengan apa yang telah disepakati. Pemerintah ingkar dan tidak melanjutkan pembongkaran pipa PDAM. Reaksi atas

kondisi ini masyarakat membongkar bak pelepasan tekanan air dan reservoir dengan harapan pemerintah melanjutkan pembongkaran pipa. Selain melakukan aksi ini, KRLM juga mengirimkan surat langsung untuk menegur pemerintah atas sikap yang tidak komitmen.

3. Pada tanggal 7 September 1998 Bupati menerbitkan SK Nomor 220/nKep.KDG/1998 tentang pembatalan proyek yang diikuti dengan pembongkaran pipa.
4. Pada tanggal 14 September 1998 KRLM mengirim surat kepada Bupati Sleman, perihal tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tanggal 13 Agustus 1998 yang belum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yakni SK dan pelaksanaan reboisasi, reformasi total pengelolaan Umbul Wadon, serta pembentukan tim penyusunan AMDAL. Surat tersebut ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur DIY, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Pada hari jum'at, 18 September 1998 diterbitkan SK Reboisasi.
5. Pada tahun 1999 Dinas Pertambangan (sekarang Dinas Pengairan, Pertambangan dan Pengendalian Bencana Alam/PPPBA) menunjuk PT Sinca Mataram untuk menyusun AMDAL. Pada penyusunan AMDAL beberapa kali dilakukan diskusi antara Pemerintah Kabupaten Sleman, Tim KRLM dan Tim AMDAL. Perbedaan pun sering muncul baik menyangkut akurasi alat, metode, waktu pengukuran, sosial, budaya, ekonomi. Tetapi yang paling krusial adalah mengenai tuntutan KRLM yang tidak dicantumkan pada AMDAL yaitu pembagian air dan Kuota air pengguna. AMDAL kemudian disusun oleh tim yang sudah disepakati yang isi dari AMDAL adalah kesepakatan bersama antara Komunitas Rakyat Lereng Merapi, Pemerintah Daerah, PDAM Sleman, PD.Anindya dan PDAM Tirta Marta.
6. AMDAL selesai tahun 2000 maka dibangun bak reformasi yang dilengkapi dengan *water meter* . Bak reformasi ini berfungsi untuk mengontrol penggunaan air oleh berbagai pihak sehingga dimungkinkan tidak akan ada kecurangan. Bak reformasi ini dibangun tepat di depan mata air Umbul Wadon, dan setiap pihak berhak memiliki kunci pembuka bak reformasi sehingga dapat saling mengontrol penggunaan air umbul wadon.

e. Negosiasi dan Advokasi pada tahun 2003-2004

Dalam perjalanan waktu, pada tahun 2003/2004 PDAM Tirta Dharma (PDAM Sleman) diketahui melakukan kecurangan dengan membangun instalasi pipa *by pass* yang tidak melewati Bak Reformasi ataupun *water meter*. Mereka berdalih bahwa pipa-pipa tersebut di pasang untuk pengurusan dan pemeliharaan bukan untuk mengambil jatah lebih dari yang ditentukan. Hal ini diketahui setelah masyarakat merasakan kekurangan air lalu dilakukan pengamatan dan penyelidikan serta pengukuran.

Adanya kecurangan ini maka masyarakat kembali melakukan aksi untuk memperjuangkan hak atas sumber daya air Umbul Wadon. Berbeda dengan aksi tahun 1998, aksi pada tahun 2003-2004 tidak lagi dengan berdemonstrasi ke kantor DPRD tetapi menyuarakan aspirasinya langsung melalui media massa. Cara ini dinilai lebih efektif. Setelah dilakukan aksi ini maka konflik kembali mencuat dan kembali dilakukan negosiasi dan komunikasi untuk mencari solusi.

f. Tahap-Tahap Advokasi dan Implementasi Kebijakan tahun 2003-2004

1. Pendidikan kritis bagi para petani, yaitu membekali petani dengan pengetahuan tentang dasar-dasar hukum pengelolaan air, Amdal, dan hak-hak petani. Dari proses yang dilakukan ini diharapkan akan terbangun militansi di kantong-kantong petani untuk ikut aktif berjuang mempertahankan hak-haknya. Proses ini berjalan secara kontinyu dari Agustus 2003 – Februari 2004. Pendidikan kritis bagi masyarakat sebelum melakukan sebuah gerakan sangat diperlukan untuk membentuk karakter militan petani dan juga untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan yang memadai sehingga dalam melakukan gerakan apabila ada ancaman maupun gangguan tetap pada pendirian yang teguh dan tidak mudah goyah.
2. Kampanye di media massa dan pertemuan masyarakat pada April 2004. Terkuaknya kecurangan tersebut menyebabkan Pemda dan PDAM Sleman kalangkabut dan menyebabkan informasi yang beredar menjadi sangat kompleks dan apabila dibiarkan akan menimbulkan konflik kekerasan.
3. Membentuk tim negosiasi yang terdiri atas 7 orang yang mewakili petani, pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), dan aktivis LSM. Tim negosiasi, yang kemudian disebut Tim 7, bertugas untuk mewakili petani dalam mempersiapkan dan melakukan perundingan dengan pihak-pihak yang terkait, maupun menjadi

- juru bicara untuk kepentingan petani. Tim 7 juga mengambil peran untuk bisa melokalisir permasalahan sehingga tetap pada fokus semula, yaitu tentang kecurangan PDAM Sleman.
4. Melalui proses negosiasi yang dilakukan oleh Tim 7 dengan Pemda Sleman dan PDAM Sleman sepanjang April – Mei 2004 akhirnya membuahkan hasil, walaupun sempat dilakukan perundingan yang sangat alot beberapa kali. Pada 21-30 Mei 2004, dilakukan pengukuran debit dan pengalokasian air sesuai dengan Amdal, yang diikuti oleh Pemda Sleman, petani, LSM, dan Perusahaan Air Minum. Dalam pengukuran ulang tersebut juga terkuak ternyata bukan hanya PDAM Sleman yang melakukan kecurangan, tetapi juga PDAM Tirta Marta dan PD. Anindya karena mereka memasang *pipa by pass* yang tidak melalui bak pembagian air. Pada saat itu juga dilakukan pembongkaran pipa oleh masyarakat. Namun memang dari sisi eksploitasi air, PDAM Sleman melakukan kecurangan yang paling besar. Selain pengalokasian air sesuai dengan Amdal, disepakati juga oleh para pihak agar ada perbaikan dan peningkatan dalam melakukan konservasi di Kali Kuning.

G. Kesimpulan

Kecenderungan pengelola lingkungan merumuskan persoalan lingkungan secara biologis dan teknis belaka, kurang berhasil dalam menghadapi aspek sosial dan politik dalam pengelolaan lingkungan karena perhatian dalam persoalan tersebut masih sangat kurang, termasuk salah satunya pengelolaan sumber daya air. Sebagai seorang perencana dan pengelola sumber daya air dituntut untuk dapat memahami paradigma air sebagai *“physical unit”* meliputi proses sumber daya alam dan lingkungan serta sebagai *“social unit”* meliputi perilaku manusia dan berbagai faktor sosial yang dapat mempengaruhi dalam pengelolaannya.

Keberadaan Umbul Wadon tidak terlepas dari pengaruh kehidupan masyarakat lokal beserta kebiasaan hidup dan sistem kepercayaan, pandangan bahwa manusia adalah bagian dari alam serta kepercayaan masyarakat lokal (*local wisdom*) berupa kearifan hidup yang menekankan pada penghormatan terhadap alam dan lingkungan merupakan nilai positif dalam mencapai kehidupan yang berkelanjutan tertuang dalam ritual adat dandan kali. Masyarakat percaya adanya kekuatan lain yang perlu dihormati, apabila manusia berbuat baik pada alam maka akan memperoleh imbalan yang baik pula.

Pengelolaan mata air Umbul Wadon melibatkan beberapa aktor

yakni pemerintah, masyarakat, PDAM Sleman, serta kelompok usaha lainnya menggiring pada terjalinnya pola-pola hubungan yang saling mempengaruhi. Adanya sifat ketergantungan masing-masing *stakeholders* pada pasokan air dari Umbul Wadon menuntut terjadinya jalinan kerjasama dari masing-masing aktor baik dalam kegiatan pemanfaatan maupun konservasi hutan dan air. Jalinan kerjasama itu terjalin akibat adanya 'ketidakpuasan' masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan yang berbuah aksi gerakan masyarakat yang mampu mengubah kebijakan pemanfaatan air Umbul Wadon. Dari aksi tersebut maka dihasilkan AMDAL untuk mengatur pemanfaatan air Umbul Wadon. Sampai pada saat ini hal yang terkait dengan Umbul Wadon adalah pemanfaatan mata air Umbul Wadon yang terus menerus tanpa diberengi dengan pemeliharaan yang maksimal.

Daftar Pustaka

- Afrizal, *Sosiologi Konflik Agraria (protes-protes agraria dalam masyarakat Indonesia kontemporer)*, Padang: Andalas University Press, 2006.
- Agustina, Fitria, N.Kusuma, *Gelombang Perlawanan Rakyat (Kasus-kasus gerakan social di Indonesia)*, Yogyakarta: insist press, 2004.
- Azhar, Ipong S, *Radikalisme Petani Masa Orde Baru (Kasus Sengketa Jenggawah)*, Yogyakarta: Desain Grafis dan Pencetak PT Tarawang, 1999.
- Budiman, Arief, Olle Tornquist, *Aktor Demokrasi (catatan tentang gerakan perlawanan di Indonesia)*, Indonesia: PT Sembrani Aksara Nusantara, 2001.
- Dokumen Pendampingan Masyarakat LSM Wana Mandhira Yogyakarta.
- Fakih, Mansour, Roem Topatimasang, Toto Rahardjo, *Mengubah Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Insist Press, 2007.
- Fauzi, Noor, *Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*, Yogyakarta: Insist Press, 2005.
- Huraerah, Abu dan Purwanto, *Dinamika Kelompok*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Landsberger, Henry A, YU.G.Alexandrov, *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*, Jakarta: CV Rajawali, 1984.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Lofland, John, *Protes*, Yogyakarta: Insist Press, 2003.
- Mitchell, Bruce, B. Setiawan, Dwita Hadi Rahmi, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Mirsel, Robert, *Teori Pergerakan Sosial*, Yogyakarta: Insist Press, 2004.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Nugroho, Heru, *Gelombang Demokrasi Dunia (Gerakan Sosial dan Perubahan Politik)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Profil Desa Umbulharjo tahun 2007
- Salim, Agus, Drs, MS, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2006.
- Silaen, Victor, *Gerakan Sosial Baru (Perlawanan Komunitas Lokal pada*

WELFARE, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2012

Kasus Indorayon di Toba Samosir), Yogyakarta: IRE Press, 2006.

Suharko, *Gerakan Sosial*, Malang: Averrroes Press, 2006.

Tjokrowinoto, Moeljarto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Wahyudi, *Formasi dan struktur gerakan petani (studi kasus reclaiming/ penjarahan atas tanah PTPN XII (Persero Kalibakar Malang Selatan)*, Malang: UMM Press, 2005.

Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, 2002.

Yin, Robert K, Prof, Dr. *Studi Kasus Desain dan Metode*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2006.

Internet:

http://www.forplid.net/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=1, down load 13 juli 2008. 05.57

http://digilib.ampl.or.id/detail/detail.php?row=4&tp=artikel&ktg=airminum&kd_link=&kode=62, down load tanggal, 13 juli 2008. 06.03

Hartanto, 2004, *Membangun Kolaborasi Hulu-hilir*. Pelajaran dari Umbul Wadon

(www.google.com).

Astri Hanjarwati adalah Dosen Prodi Ilmu kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta